

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan dan keselamatan setiap warga negara Indonesia merupakan hak dasar yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun akibatnya Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kesehatan anak dan orang dewasa, salah satunya adalah stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Stunting terjadi ketika tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan kebutuhannya, hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronik dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang secara optimal. Dampak stunting pada anak sangat merugikan karena dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif, menurunkan produktivitas seiring berjalannya waktu, dan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis (Larasati, 2017:1).

Stunting biasanya dikaitkan dengan kemiskinan, kekurangan nutrisi dan kesehatan ibu hamil yang buruk, sakit, dan infeksi yang berulang-ulang, serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak dalam segala aspek kehidupan, baik itu bersifat fisik atau sosial. Gejala utama stunting antara lain terhambat, kurang badan, ketelambatan perkembangan motorik, dan risiko terhadap infeksi. Jika prevalensi stunting terus menjadi permasalahan di Pemprov DKI Jakarta, maka kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Jakarta akan meningkat.

Tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018 dan juga menjadi tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2022, prevalensi stunting terus menunjukkan tren penurunan.

**Universitas Kristen Indonesia**

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun sebanyak 2,8% poin dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%. Meskipun mengalami penurunan, namun penurunan sebesar 2,8% poin kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,4% per tahun. Dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,8% poin, maka untuk mencapai target di tahun 2024 prevalensi stunting harus dapat diturunkan sebesar 7,6% poin dalam 2 tahun ke depan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program dalam 2 tahun ke depan (Kementian dan Lembaga, 2023:1).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 14,8% pada tahun 2022 berdasarkan survei SSGI. Berdasarkan data SSGI terbaru tahun 2022, angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 2% dari 16,8% pada tahun 2021. Saat ini, prevalensi stunting tertinggi terdapat di perdesaan dengan prevalensi 20,5% dan di perkotaan seperti seperti Jakarta yang sebesar 18,5%. Namun percepatan stunting tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Meski mengalami kesulitan, anak beresiko tetap diasuh (BKKBN, 2023:2).

Pencegahan dan penanganan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 merupakan salah satu strategi yang menguraikan banyak sektor yang harus dikoordinasikan secara berkualitas mulai dari tingkat daerah hingga daerah. Pendapat gubernur mengenai angka stunting di tingkat provinsi. Dalam UU Nomor 1 huruf a mempunyai beberapa tugas:

“Mengkoordinasikan, mensinkronasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya”.

Perpres no 72 tahun 2021 menyatakan:

“Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Salah satu strategi yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dalam kajian prevalensi stunting adalah sinkronisasi data stunting atau gizi buruk yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini meliputi pemberian vitamin dan gizi kepada masyarakat yang tinggal di daerah stunting dan fokus pada pemberian pelayanan gizi pada tiga periode penting. Ibu saat hamil, bayi usia 6–11 bulan, anak usia 12-23 bulan, dan memberikan edukasi stunting kepada dunia usaha dan karyawan di Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2020:33).

Prevalensi stunting di DKI Jakarta adalah 13,4% pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 14,8%. Hal ini disebabkan karena stunting dapat dicegah dan ditanggulangi dengan kegiatan yang holistik dan terpadu yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Masalah stunting itu ada beberapa daerah, yang berdampak pada keberlangsungan hidup anak dalam jangka panjang, mempengaruhi kualitas hidup, kemampuan kognitif, kesehatan, dan produktivitas anak di masa depan. Salah satu contoh wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terkait masalah stunting di Kelurahan Cawang yang mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 berjumlah 8572 keluarga, adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 13.910 jiwa dan jumlah penduduk sebanyak 40.806 jiwa tahun 2023, yang terbagi menjadi 12 RW dan 116 RT pada tahun 2023 (BPS Kelurahan Cawang, 2023:45).

**Universitas Kristen Indonesia**

Kelurahan ini terletak di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga menghadapi berbagai masalah sosial salah satunya masalah ekonomi dan masalah kesehatan anak. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa Kelurahan Cawang menunjukkan kasus tetinggi balita stunting, dengan mencapai 29 balita stunting, diperlukan kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Cawang guna mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dengan latar belakang ini maka peneliti memilih judul “Implementasi kebijakan pencegahan dan penaganan stunting di Kelurahan Cawang tahun 2022-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kebijakan merupakan salah satu hasil utama dari proses politik untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum. Menyikapi permasalahan stunting di Indonesia, pemerintah telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan beberapa undang-undang, antara lain UU Daerah tentang perubahan Keputusan Gubernur Nomor 981 tentang Stunting dan Undang-undang Gubernur DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Stunting. Oleh karena itu, prevalensi stunting di DKI Jakarta diperkirakan akan lebih tinggi (Suhardika, 2022).

DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk 16.158 orang per km pada tahun 2022. Setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk jakarta pada tahun 2022, Badan Pusat Stastistik (BPS) dengan jumlah penduduk DKI Jakarta akan mencapai 10,67 juta jiwa, naik 0,66% dari tahun 2021. Hal ini merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Indonesia pada tahun 2020-2022, pertumbuhan tidak selaras dengan luas wilayah Jakarta yang berjumlah 0,03%. Sehingga kepadatannya sangat tinggi diatas rata-rata ideal kepadatan penduduk. Tingkat kemiskinan di Jakarta pada tahun 2022 mencapai 4,61% dan tingkat kekayaan atau ekonomi mencapai 5,25% pada tahun 2022.

**Universitas Kristen Indonesia**

Sehingga dengan kondisi ini dapat dilihat bahwa Jakarta memiliki beberapa persoalan khususnya masalah kesehatan salah satunya adalah stunting (BPS, 2021:67).

Kecenderungan kenaikan prevalensi stunting di DKI Jakarta, disinyalir karena adanya implementasi kebijakan dalam pencegahan dan penanganan stunting yang kurang tepat. Implementasi kebijakan yang kurang tepat sepanjang tahun 2020-2022.

Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terkait masalah stunting adalah Kelurahan Cawang sebagai salah satu wilayah yang tergolong memiliki kepadatan tinggi dan juga mengalami berbagai macam persoalan antara lain kesehatan, ekonomi, pendidikan.

Dalam konteks stunting, Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan serangkaian keputusan yang didasarkan pada Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Waktu Stunting dan Sekretariat Daerah Nomor 101 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Waktu Stunting di Provinsi Khusus Bagi Warga Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengarahkan kegiatan stunting dan stunting pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Anggaran daerah dukungan kebijakan untuk stunting dan pencegahan stunting telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 provinsi DKI Jakarta (Jakarta, 2023).

Persoalan yang sering terjadi dalam kebijakan siklus tidak hanya berkaitan dengan perumusan; Sebaliknya, penerapan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya, gaya komunikasi, dan faktor eksternal. Hal inilah yang terjadi pada stunting di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting melalui Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Cawang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Teoritis**

1. Untuk mengetahui Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 dalam pembuatan keputusan terhadap stunting.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Cawang.

#### **1.4.2 Tujuan Praktis**

Penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S. Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

#### **1.5.1 Signifikansi Praktis**

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teoritik terhadap masalah stunting yang ada di Kelurahan Cawang.
2. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

Melalui sosialisasi hasil penelitian, masyarakat akan lebih memahami risiko stunting dan cara-cara untuk mencegahnya, yang berpotensi meningkatkan partisipasi dalam program-program kesehatan.

### 1.5.2 Signifikansi Teoritis

1. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah stunting.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting dalam konteks pembangunan kesehatan dan kesejahteraan anak.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Jenis tinjauan pustaka ini digunakan dalam hasil penelitian harian pustakawan-jurnal yang relevan dengan fokus kajian implementasi kebijakan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi setiawan, Tahun 2023 dengan judul penelitian “Sinergitas Dalam Percepatan Penanganan Kasus Stunting di Kota Serang”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sinergitas yang dikemukakan oleh Michael Doctoroff.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kota Serang belum berjalan dengan baik, karena kurangnya kesadran akan pola hidup sehat yang mengkaibatkan

				angka stunting masih tinggi di Kota Serang.
2	“Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu,” Dela Rosita Sari lahir pada tahun 2021.	Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.	Teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan dijelaskan oleh Edward III (1980)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang belum dilaksanakan dengan baik.
3	“Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar” dirilis oleh Andika Yuli Pratama pada tahun 2020.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.	Menurut Edward III, teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan.	Stunting di wilayah Kampar belum dapat diatasi secara efektif, hal ini dikarenakan pentingnya komunikasi dalam mendorong pegawai untuk bekerja keras dan meningkatkan kemampuannya.
4	“Implementasi Kebijakan pencegahan stunting Kecamatan limapuluh di Kota Pekanbaru,”	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Teori yang digunakan adalah Teori Edward III	Implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik,

	Indah Lestari 2024			namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor kunci yang menjadi pertimbangan dalam penerapan strategi pencegahan stunting.
--	-----------------------	--	--	---



Dari pemaparan singkat penelitian terdahulu diatas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Perbandingan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dalam penelitian “*Sinergitas Dalam Percepatan Penanganan Khusus Stunting di Kota Serang*”. Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada judul, lokasi, teori dan waktu penelitian. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada sama-sama membahas terkait Penangan stunting. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan George Edwards III dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023.
2. Dalam penelitian “*Implementansi Kebijakan Penanganan Stunting Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*”. Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada judul, lokasi, waktu penelitian. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada sama-sama membahas terkait Penangan stunting dan teori. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan George Edwards III dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023.
3. Dalam penelitian “*Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*”. Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada judul, lokasi, waktu penelitian. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada sama-sama membahas terkait Penangan stunting dan teori.

Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan George Edwards III dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023.

4. Dalam penelitian “*Implementasi Kebijakan pencegahan stunting Kecamatan limapuluh di Kota Pekanbaru*”. Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaanya teletak pada judul, lokasi, waktu penelitian. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada sama-sama membahas terkait penangan stunting dan teori. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan George Edwards III dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Implementasi Kebijakan**

Kebijakan adalah jenis keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok politik untuk memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Menurut prinsip ini, mereka yang merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya (Dunn, 2003).

Berdasarkan definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa seseorang atau sekelompok individu yang melakukan berbagai aktivitas, program, atau tindakan dapat mengembangkan perilaku tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kebijakan adalah suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan suatu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan fasilitas yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang telah diselesaikan.

**Universitas Kristen Indonesia**

Selain itu, kebijakan mempunyai kelebihan karena dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lestari, 2024).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn:

a. Agenda Penyusunan

Penyusunan agenda (Agenda setting) merupakan suatu proses strategis dalam konteks kebijakan publik yang memungkinkan berkembangnya isu-isu publik dan prioritas dalam agenda tersebut. Keberhasilan muncul ketika suatu isu dibingkai sebagai isu publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan isu lainnya. Isu kepentingan publik yang akan menjadi sumber pembangunan pemerintah sangatlah penting dalam perencanaan agenda. Penyusunan agenda kebijakan melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta tingkat esensi dan urgensi kebijakan.

b. Rumus Kebijakan

Sesudah pembahasan permasalahan yang diangkat dalam agenda, pembuat kebijakan akan membahas permasalahan lainnya. Pada titik ini permasalahan di atas sedang diatasi dengan tujuan mencari solusi terbaik. Beberapa alternatif atau opsi kebijakan yang tersedia digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Sebagai peluang untuk berpartisipasi dalam agenda kebijakan, dalam konteks kebijakan perumusan, setiap alternatif dapat dilakukan dan berfungsi sebagai solusi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan transparansi dalam operasional pemerintah. Jika masyarakat yakin bahwa suatu tindakan tertentu adalah sah, maka mereka akan mengikuti instruksi

**Universitas Kristen Indonesia**

pemerintah karena mereka yakin bahwa tindakan tersebut benar. Dukungan terhadap rezim sering kali merupakan tanda penyebaran, yang timbul dari sikap dan niat baik terhadap tindakan pemerintah. Hal ini membantu individu mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah. Legitimasi dapat dicapai dengan memanipulasi simbol-simbol tertentu, sehingga melalui proses ini masyarakat dapat belajar bagaimana memberikan informasi kepada pemerintah.

d. Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Salah satu contoh evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang melibatkan estimasi atau analisis kebijakan yang mempertimbangkan substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan dilakukan pada setiap tahapan proses, tidak hanya pada akhir proses. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat menentukan implementasi, tahap dampak kebijakan, program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kebijakan, dan tahapan penyusunan kebijakan (Liando, 2019).

Kebijakan disebut juga kearifan adalah suatu proses atau pengembangan yang bertujuan sebagai landasan atau pedoman kebijakan. Kebijakan adalah suatu jenis keputusan yang ditentukan oleh aktor politik melalui berbagai cara, termasuk menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya (Anam, 2020).

### 1.7.2 Model Implementasi kebijakan George Edwards III

Fase implementasi merupakan tahapan krusial dalam kebijakan publik. Hal ini cukup jelas, meskipun terkadang disebut sebagai penandatanganan atau keputusan legislatif. Kehadirannya menjadi kunci *aufgrunda* suatu kebijakan hanya mempunyai arti jika dapat dilaksanakan secara efektif dan akurat.

Dengan kata lain, implementasi berfokus pada kemampuan suatu proyek untuk dilaksanakan seefektif mungkin sehingga tujuan proyek dapat tercapai.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang panjang berdasarkan rumusan di atas. Implementasi mengacu pada tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. (Mustari, 2015).

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Salah satu tantangan utama dalam proses kebijakan publik, khususnya di Indonesia, adalah implementasinya yang terhambat oleh komunikasi yang tidak efektif. Selain itu, gangguan komunikasi dapat terjadi selama fase implementasi dan juga selama transisi.

Komunikasi harus dimulai segera setelah tahap perumusan kebijakan selesai. Materi muatan dan kebijakan dapat dipahami dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dengan cara ini. Pada tahap implementasi, intensitas komunikasi sangat penting untuk menumbuhkan kerja sama tim dan saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat. (Mening Subekti, 2017)

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjelaskan suatu kebijakan tertentu; Oleh karena itu, kebijakan yang akan dijelaskan harus dapat dipahami oleh masyarakat yang melaksanakannya.

Dengan cara ini permasalahan dapat dikomunikasikan dan dijelaskan secara jelas, akurat, dan konsisten tanpa menimbulkan kontradiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi mempunyai dampak positif terhadap hasil implementasi di Cawang. Fungsi komunikasi yang dihasilkan dari implementasi kebijakan meliputi:

a. Transmisi

Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik. Namun akan timbul permasalahan dalam komunikasi karena adanya pemahaman (miskomunikasi) yang mengakibatkan banyaknya birokrasi tingkatan yang harus dibenahi melalui proses komunikasi, sehingga segala sesuatu yang diharapkan akan terungkap.

b. kejelasan

Komunikasi yang dilakukan kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak jelas.

c. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan, terget grup dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dimana dimensi komunikasi meliputi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber daya

a. Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan dengan baik, dan digunakan sebagai indikator untuk melihat bagaimana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Staf yang paling penting dalam melaksanakan rencana adalah staf, yang disebut juga pegawai. Salah satu permasalahan yang

sering muncul pada saat implementasi kebijakan adalah disebabkan oleh kurangnya kompetensi staf atau pegawai di bidangnya. Kebijakan penerapan tidak menyelesaikan permasalahan penerapan jumlah staf dan pelaksana saja; Oleh karena itu, diperlukan staf yang memiliki keterampilan dan kemampuan (kompeten dan mampu) untuk melaksanakan kebijakan.

- c. Ada dua jenis informasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan: informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan informasi tentang data yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewenangan adalah kewenangan atau legitimasi bagi masyarakat yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politis. Kekuatan para pelaksana dimata publik tidak dilegitimasi jika tidak ada yang berwenang, yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik. Namun, dalam konteks lain, di mana terdapat kewenangan formal, seringkali terdapat masalah dalam mengevaluasi efektivitasnya. Menurut satu orang, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan tetapi di sisi lain. Efektivitas akan menunjukkan bagaimana wewenang ditangani oleh parapetaksina secara individu atau kelompok.
- d. Fasilitas fisik sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan rencana oleh tim pelaksana. Harus ada fasilitas fisik untuk memfasilitasi proses komunikasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas fisik yang membantu maka pelaksanaannya juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini didasarkan pada prinsip kebijakan (Mustanir, 2016:544).

### 3. Disposisi

Disposisi adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap

program memerlukan kegiatan yang mempunyai komitmen dan keinginan yang tinggi guna mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi (komitmen) kemampuan dan kemauan komitmen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kognisi adalah studi tentang perilaku dalam kaitannya dengan tujuan. Bagi tim pelaksana, memahami tujuan kebijakan sangatlah penting. Penerapan kebijakan tidak akan berjalan efektif jika sistem yang mendukungnya berbeda dengan sistem yang menciptakannya. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat umum, dapat mengakibatkan implementasi program menjadi kurang efektif.
- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang direkomendasikan untuk mengatasi persoalan sikap para pelaksana kebijakan dengan menerapkan insentif. Menurut keyakinannya sendiri, masyarakat dimotivasi oleh kebutuhannya sendiri, sehingga sulit bagi mereka yang menjalankan tugasnya untuk tidak punya perasaan. Dengan diturunkannya keuntungan atau biaya dapat menjadi faktor penentu yang membantu tim pelaksana melaksanakan tugas dengan sukses. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi pentingnya individu atau organisasi.

#### Struktur Birokrasi

*Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan hasil manajemen waktu internal, operasional sehari-hari, dan perlunya pengawasan dalam organisasi kerja yang kompleks dan berskala besar. SOP atau prosedur operasi standar, biasanya digunakan untuk mengurangi jumlah insiden yang terjadi di berbagai sektor publik dan swasta.

Dengan menggunakan SOP, karyawan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menjadi panduan untuk memastikan bahwa karyawan di organisasi yang kompleks menyelesaikan tugas dengan tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga menghasilkan kualitas atau produktivitas yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan.

#### 4. Stuktur Birokrasi

- a. *Standar Operating Prosedur* adalah waktu internal dan sumber daya dalam suatu organisasi tertentu. Salah satu komponen struktural terpenting dari setiap organisasi adalah proses kerjanya; dengan menggunakan SOP, para profesional dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.
- b. Fragmentasi merupakan tanggung jawab suatu kebijakan tertentu kepada beberapa badan lain, oleh karena itu diperlukan koordinasi. Secara umum, semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin kecil kemungkinan program atau kebijakan tersebut akan berhasil. Fragmentasi merespons pandangan-pandangan yang mewakili banyak birokrasi organisasi. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana tersebut.

Menurut Ahli, model implementasi Edwards III memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model implementasi lainnya. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Edwards III adalah bahwa model ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek implementasi kebijakan untuk menyeimbangkan banyak variabel dalam implementasi; pendekatan ini juga mengadopsi pendekatan holistik dan membantu masyarakat umum memahami implementasi kebijakan secara komprehensif.

Selain itu, model Edward III menyoroti perlunya memahami proses kebijakan dan mengidentifikasi permasalahan apa pun yang mungkin timbul dalam model lainnya. Dengan mengkaji berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan organisasi, model ini memberikan pemahaman yang komprehensif (Lestari, 2024).

Tabel 1.2  
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Menurut George Edwards III, pelaksanaan Pencegahan dan stunting di Kelurahan Cawang	komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. konsistensi
	Sumber Daya Manusia	a. sumber daya manusia b. informasi c. kewenangan d. fasilitas fisik
	Disposisi	a. Eksekusi kebijakan b. Dedikasinya dalam menjalankan kebijakan
	Struktur Birokrasi	a. Prosedur operasi standar (SOP) b. Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan

## 1.8 Alur Pemikiran

Alur pemikiran dibahas berdasarkan temuan penelitian serta permasalahan yang muncul dari latar belakang tersebut di atas. Berikut alur pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa stunting masih menjadi masalah utama di Indonesia, dengan angka stunting yang menurun sejak tahun 2013. Stunting juga semakin banyak terjadi.

Namun menurut Pemantauan Status Gizi (PGS) tahun 2017, stunting mengalami penurunan sebesar 29,6%, meskipun tersebut masih cukup tinggi tahun 2007 angka yaitu sebesar 36%, turun di tahun 2010 sebesar 35,6%, dan tahun 2013 naik menjadi menjadi 37,2%. Pada tahun 2021 di Indonesia mencapai sebesar 24,4% dan tergolong tinggi. Salah satu contoh prevalensi stunting adalah Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang memiliki kasus stunting yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor penyebab terjadinya stunting di kota Serang Provinsi Banten adalah kurangnya kebersihan lingkungan dan kurangnya asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan sehingga terjadinya stunting.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Cawang, stunting menjadi permasalahan di wilayah tersebut pada tahun 2022–2023. Mencermati prevalensi stunting di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperbarui pedomannya berdasarkan Keputusan Gubernur no. 981 tahun 2022 tentang angka stunting dan dampaknya. Dengan adanya peraturan ini maka strategi pencegahan stunting dapat dilaksanakan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap strategi ini adalah komunikasi, aktivitas sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari ketiga unsur diatas, peneliti membahas tentang Teori Penerapan Hukum George Edward III.

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan stunting, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat upaya pencegahan stunting.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan pendekatan Kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikan Metode Penelitian Kualitatif sebagai suatu teknik atau pendekatan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah tertentu.

Oleh karena itu, kuesioner yang lebih akurat akan digunakan untuk mengevaluasi penelitian ini, dan setelah menerima informasi dalam bentuk teks atau kata-kata, data yang lebih akurat akan dianalisis. Hasil analisis awal ini dapat disebut deskripsi atau gambaran, yang akan menghasilkan interpretasi untuk memahami karya seni tersebut (Raco, 2010).

Penelitian kualitatif lebih banyak menghasilkan analisis deskriptif dibandingkan analisis prediktif. Tujuannya adalah untuk memahami bahasa kajian secara jelas dan ringkas. Setiap kasus dianggap sah dan memiliki potensi melalui penelitian ilmiah. Setiap kasus melibatkan analisis dan interpretasi menyeluruh terhadap perilaku manusia. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menunjukkan pengamatan dan kemajuan yang baik terhadap subjek atau peneliti (Roikan, 2019).

Jenis deskriptif kualitatif ini memungkinkan adanya penjelasan penelitian dengan penekanan pada implementasi hukum, yang dapat digunakan untuk mengamati fenomena aktor yang berinteraksi dengan berbagai instrumen.

### **1.9.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menguji hipotesis atau teori. Berdasarkan kerangka teori penelitian kualitatif yang telah ditetapkan, tujuan penelitian jenis ini adalah untuk menarik perhatian terhadap data baru yang mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi dengan menggunakan metode yang memanfaatkan informasi dan data yang telah diteliti sebelumnya. Data dalam temuan penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ditemukan selama observasi peneliti di lapangan (Sugiono, 2014).

Pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen merupakan contoh metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa faktor.

**Universitas Kristen Indonesia**

Pertama, metode kualitatif akan lebih mudah disesuaikan jika sejalan dengan pernyataan jamak. Di sisi lain, metode ini secara diam-diam menilai hubungan antara peneliti dan responden. Menurut Kusumastuti Adhi dan Khoiron Ahmad (2019), pendekatan ini lebih menyeluruh dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap beberapa pengaruh kolaboratif yang berkaitan dengan pola-pola nilai yang sedang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menyempurnakan suatu teori tertentu. Teori ini kemudian digunakan untuk menjelaskan atau mengilustrasikan suatu permasalahan tertentu yang timbul dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

### **1.9.3 Desain Penelitian**

Desain deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau mengilustrasikan suatu objek tertentu yang telah diteliti dengan menggunakan data-data atau sampel-sampel yang telah dikumpulkan sedemikian rupa sehingga dengan adanya suatu data tanpa melakukan analisis akan menimbulkan suatu kesimpulan yang dapat diterapkan pada semua orang.

Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang menghasilkan data analitis yaitu data privat, dan metode ini secara konsisten menghasilkan data deskriptif. Menurut Ahli Nasir Metode deskriptif kualitatif diterapkan pada suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, dan kelompok belajar tertentu. Tujuan penelitian deskriptif adalah menghasilkan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Deskriptif tidak selalu memberikan informasi tentang suatu situasi atau penelitian; itu juga membangun koneksi, membuat prediksi, dan mengadaptasi arti dari perubahan.

Desain ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka peneliti melakukan pendekatan terhadap objek penelitian dengan menggali informasi lebih dalam sesuai dengan persep Rancangan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan secara akurat Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023. Dengan menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti dapat melakukan penelitian sesuai tujuan penelitian dengan menganalisis data secara lebih menyeluruh sesuai dengan persepsi dan datanya sendiri, serta dengan berinteraksi dengan partisipan dalam proses wawancara.

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan. Selain itu, salah satu lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Cawang. Si peneliti dan informasi serta dapat dikembangkan sesuai dengan interaksi dalam proses wawancara yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan. Dan adapun yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan Cawang.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono menyatakan bahwa secara keseluruhan terdapat empat macam prosedur pengumpulan informasi, yaitu persepsi, rapat, dokumentansi dan triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dukomentansi.

1. Wawancara adalah kemampuan dua orang untuk berbagi ide dan informasi melalui jawab sehingga dapat disumbangkan pada suatu objek tertentu.

Ada tiga jenis wawancara: terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Menurut Sugiono (2019), Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti atau pengumpul data mempunyai pemahaman menyeluruh atas semua informasi yang telah diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data telah berhasil diselesaikan, dan instrumen yang digunakan untuk penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya telah ditentukan. Dengan struktur ini, setiap responden akan memberikan pertanyaan serupa, serta pengumpulan dan analisis data.

Wawancara tak berstruktur, menurut Sugiono wawancara yang bebas, adalah ketika peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan data. Wawancara yang dapat digunakan hanya berfungsi sebagai rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai responden, peneliti juga dapat menggunakan wawancara tidak terstruktur. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti melakukan wawancara diam kepada para partisipan guna memperoleh informasi yang jelas terkait permasalahan yang akan diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur No 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kelurahan Cawang Tahun 2022-2023.

2. Dokumen merupakan peristiwa cacatan yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan seseorang, ilustrasi, atau cerita monumental. Diantara dokumen yang memuat tulisan adalah catatan sejarah, kisah hidup, catatan biografi, dokumen hukum, dan kebijakan.

Dokumen meliputi gambar, sketsa, dan gambar kehidupan sehari-hari. Dokumentasi merupakan hasil penggunaan metode observasional dan kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan di atas, dokumentasi penelitian ini dapat diselesaikan dengan mengirimkan dokumen berisi gambar melalui website dan mengirimkan dokumen dari kantor Cawang melalui WhatsApp secara perlahan dan mudah untuk menunjang pekerjaan peneliti.

### 1.9.5 Informan

Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang kondisi penelitian penelitian dalam buku Metode Kualitatif. Untuk menganalisis informasi atau data dalam penelitian ini, peneliti harus mempunyai informasi yang diperlukan.

Sedangkan menurut Andi data penelitian kualitatif menjelaskan, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Dari penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Untuk memahami informasi atau data dalam penelitian ini, peneliti mempunyai informasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1.3 Informan

No	Informan	Jumlah	Jabatan
1	-Rijal -Ahmad	2	-Masyarakat

2	-Supriyatna	1	-orang tua balita
3	-Suratmi -Lia -Mia	3	-Wakil PKK -Sekretaris PKK -Anggota PKK
4	-Evi Novitayanti	1	-Staff Kesehtraan
5	-Wendi -Sanusi	2	-RT 07/RW 11 -RT 08/RW 11

Sumber : Olahan Peneliti

### 1.9.6 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya yang belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian.

Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas ini bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisahkan kedalam variabel-variabel penelitian. Bagaimanapun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif *the researcher is the key instrumen*. Jadi penelitian ini suatu instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020).

Instrumen yang dapat dijadikan pedoman bila didasarkan pada teori dan prioritas penelitian yang relevan antara lain model implementasi kebijakan. Pendekatan George Edward III digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan konservasi energi. Dalam keadaan apa implementasi mungkin muncul dari keadaan abstrak dan pertanyaan apakah terdapat kondisi yang cukup agar implementasi berhasil? Variabel dalam kebijakan publik ada tiga: komunikasi, sumber daya, sikap da, dan struktur bioraks. Faktor keempat tersebut di atas harus dilakukan secara simultan karena terdapat hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan banyak faktor. Subfaktor faktor utama ditampilkan sehingga dapat dilihat dampaknya terhadap implementasi. Untuk memudahkan penggunaan instrumen penelitian maka perlu dibuat kisi-kisi.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Teori dan Konsep	Dimensi	Indikator	Item	Narasumber
1	Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III	Implementasi kebijakan	1. Komunikasi antar lembaga pelaksana (dalam hal ini meliputi kelurahan, kecamatan, unit kesehatan/pukesmas bidan serta kader PKK penulhan KB) 2. Komunikasi intra lembaga 3. Komunikasi publik (meliputi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat)	1. Seberapa sering bapak/ibu mengikuti rapat kordinasi terkait pencegahan dan penanganan stunting? 2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam komunikasi antar lembaga pelaksana dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting? 3. Sejauh mana informasi mengenai kasus stunting dan intervensi yang dilakukan atau	1. Wakil ketua PKK (Suratmi) 2. Kesra ) Evi Noviyanti_ 3. Wendi M (RT 08/RW 11)

				<p>disampaikan secara efektif ?</p> <p>4. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar lembaga pelaksana di masa mendatang?</p> <p>5. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program pencegahan diintegrasikan dalam komunikasi antar lembaga?</p>	
			Sumber Daya	1. Bagaimana proses pendataan dan	1. Wakil Ketua PKK (Suratmi )

				<p>pemantauan dilakukan secara berkala?</p> <p>2. Bagaimana hasil pemantauan terakhir menunjukkan perubahan status gizi anak di wilayah ini?</p> <p>3. Apa langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas program?</p> <p>4. Bagaimana cara memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan?</p>	<p>2. Sanusi (RT07/RW 11)</p> <p>3. Masyarakat (Rijal)</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>5. Bagaimana pengolahan dan pengawasan sumber daya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>6. Apa peran sumber daya manusia dalam mendukung atau mengambat upaya implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>7. bagaimana sumber daya finansial</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mempengaruhi akses ketersediaan program pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>8. Bagaimana alokasi sumber daya termasuk anggaran personel, dan infrastruktur mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p>	
			Disposisi	<p>1. Bagaimana faktor-faktor kebudayaan dan lingkungan mempengaruhi keberhasilan kebijakan</p>	<p>1. Staff Kesejahteraan Rakyat (Evi Novitayanti)</p> <p>2. Anggota PKK (Mia)</p>

				<p>penanganan stunting?</p> <p>2. Apa implikasi kebijakan global, regional, dan nasional terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>3. Bagaimana perubahan tren perilaku masyarakat mempengaruhi strategi implementasi kebijakan</p>	<p>3. Sekretaris PKK(Lia)</p> <p>4. Orang Tua Balita Stunting (Supriyatna)</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>penanganan stunting?</p> <p>4. Apa dampak kebijakan ekonomi dan keuangan terhadap sumberdaya yang tersedia untuk program pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>5. Bagaimana perubahan demografi, seperti pertumbuhan penduduk dan migrasi, mempengaruhi</p>	
--	--	--	--	---	--

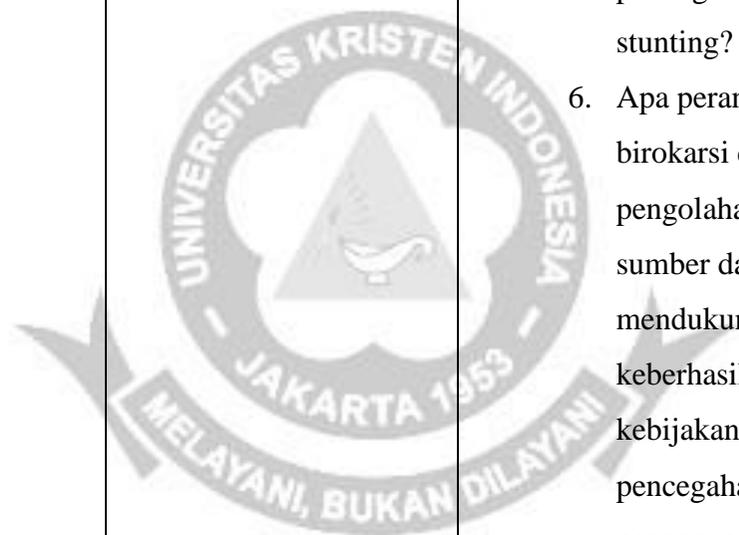
				<p>kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>6. Bagaimana faktor-faktor keamanan pangan dan akses terhadap gizi mempengaruhi strategi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>7. Apasaja saja kecenderungan sosial, ekonomi, dan demografis yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mempengaruhi implementasi kebijakan dan penanganan stunting?</p> <p>8. Apa peran faktor politik dan regulasi dalam pembentukan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, dan bagaimana kecenderungan ini mempengaruhi implementasinya?</p>	
			Birokrasi	1. Bagaimana struktur birokrasi	1. Sekretaris PKK (Lia)

				<p>memengaruhi efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>2. Apa peran lembaga pemerintah dalam koordinasi dan pengelolaan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>3. Bagaimana proses pengambilan</p>	<p>2. Masyarakat (Ahmad)</p> <p>3. RT 08/RW11 (Wendi)</p> <p>4. RT07/RW 11 (Sanusi)</p> <p>5. Kader posyandu (Lia, Tuti)</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>keputusan dalam birokrasi memengaruhi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>4. Apa dampak birokrasi terhadap respons terhadap perubahan dan kebutuhan mendesak dalam konteks stunting?</p> <p>5. Apa tantangan utama yang dihadapi birokrasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dalam mengimplentansi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>6. Apa peran birokrasi dalam pengolahan sumber daya untuk mendukung keberhasilan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?</p> <p>7. Bagaimana evaluasi kinerja dan akuntabilitas</p>	
--	--	--	--	---	--



				di dalam birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting?	
--	--	--	--	---	--



### 1.9.7 Teknik Analisis Data

Milies dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan hingga akhir, memastikan bahwa data bersifat komprehensif. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam analisis data Reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (2020, Sugiyono).

a. Reduksi data (*data reduction*)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, tema dan polanya merupakan contoh data merangkum. Dengan cara ini data yang sudah terkumpul akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan menentukan apa yang diperlukan melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Analisis kualitatif data dapat dilakukan dalam berbagai format, antara lain singkat, bagam, flowchart, dan link kategori. Analisis data yang bijaksana memfasilitasi kesimpulan sementara dan dapat mengantisipasi pertumbuhan di masa depan.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Aktivitas mermuskan simpulan berdasarkan dua kegiatan sebelumnya; simpulan ini dapat berupa simpulan kedua atau simpulan terakhir.

## 1.10 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Landasan teori dan konseptualisasi, bagian alur berpikir, metode penelitian, sistematika penulisan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan latar belakang masalah adalah beberapa hal yang dibahas dalam.

### BAB II Gambaran Objek Penelitian Kelurahan Cawang

Bagian ini membahas tentang tujuan penelitian, geografis dan ciri-ciri geografis wilayah Cawang, komposisi demografi penduduk, pendidikan, agama, perekonomian, masa Cawang, serta visi dan misi Cawang. Informasi dalam bagian ini digunakan untuk menganalisis bab-bab berikut.

### BAB III Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kelurahan Cawang

Bab ini membahas tentang bagaimana kebijakan pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Cawang sudah diterapkan dan sudah berjalan dengan baik.

### BAB IV Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting

Artikel ini membahas hasil atau temuan penelitian dan analisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, seperti menganalisis implementasi kebijakan stunting dan preventif serta menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari hasil dan dampak dari kebijakan tersebut di atas yang diterapkan pada anak. masyarakat umum, termasuk anak-anak.

### BAB V Kesimpulan

Bagian ini bertujuan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian dan mendiskusikan kesimpulan yang diambil dari teori dan temuan yang telah diteliti guna memahami seluruh konteks penelitian yang dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Selanjutnya disajikan kesimpulan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya terhadap objek penelitian.